

DISRUPSI PEMERINTAHAN & POLITIK ERA 4.0

(Catatan Akademisi FISIP Universitas Lampung)

Syafarudin, Maulana Mukhlis
(Editor)

Ari Darmastuti | Arizka Warganegara | Andy Corry Wardhani
Budi Kurniawan | Dedy Hermawan | Maulana Mukhlis
Robi Cahyadi Kurniawan | Simon S. Hutagalung
Syamsul Ma'arif | Syafarudin



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

DISRUPSI PEMERINTAHAN DAN POLITIK ERA 4.0
(Catatan Akademisi FISIP Universitas Lampung)

Penulis:

Ari Darmastuti, Arizka Warga negara, Andy Corry Wardhani,
Budi Kurniawan, Dedy Hermawan, Maulana Mukhlis,
Robi Cahyadi kurniawan, Simon S. Hutagalung,
Syamsul Ma'arif, Syafarudin

Editor :

Syafarudin, Maulana Mukhlis

Desain Cover & Layout

PusakaMedia Design

xiv + 207 hal : 14 x 21 cm

Cetakan April 2020

ISBN: 978-623-7560-71-5

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Bekerjasama dengan:

FISIP Universitas Lampung

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Daftar Isi

Pengantar Editor	v
How to Read This Book	x
Daftar Isi	xi

BAGIAN PERTAMA: DINAMIKA PEMERINTAHAN

1. Kemiskinan Lampung dan Minimnya Inovasi Pemerintahan Budi kurniawan	3
2. Deprivasi Relatif Kepemimpinan Daerah Simon S. Hutagalung	12
3. Honorer dalam Pusaran Disrupsi dan Efisiensi Maulana Mukhlis	19
4. Politik Birokrasi dan Rekrutmen CPNS Simon S. Hutagalung	25
5. Kreatifitas dan Inovasi Birokrasi Era 4.0 Syafarudin	29
6. Kepemimpinan dan Inovasi Pemerintahan Maulana Mukhlis	33
7. Reformasi Birokrasi di Simpang Jalan Simon S. Hutagalung	37
8. Terminal Agribisnis Lampung, Apa Kabarmu? Syafarudin	41

9. Diskontinu atau Lanjutkan? Syafarudin	46
10. Bad Governance dalam Penarikan BPHTB Dedy Hermawan	51
11. Mereview Kebijakan Pembangunan Fly Over di Kota Bandar Dedy Hermawan	57
12. Kolaborasi dalam Tata Kelola Bencana Maulana Mukhlis	62
13. Alasan Bandarnegara dan Corona Syafarudin	69
14. Zona Integritas dan Peringatan Dini Kepala Daerah Arizka Warganegara	74
15. Partisipasi Pemilih Versus Administrasi Pemilu Robi Cahyadi kurniawan	78
16. Pilkada, Dilema Pilihan Birokrasi Simon S. Hutagalung	84
17. Pilkada dan Netralitas Birokrasi Maulana Mukhlis	90
18. Kiprah Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK bagi Masyarakat Lampung Dedy Hermawan	95
19. Arinal dan Jokowi Milad, Pejabat Beriklan Beretikalah Syafarudin	102

BAGIAN KEDUA: DINAMIKA POLITIK

1. Quick Count dan Relevansi Pengaturannya Pada Pilpres : Belajar dari Sejarah Pilpres Ari darmastuti	109
2. Penyesuaian Australia dan Sikap Kita Budi Kurniawan	115
3. Komunikasi Politik di Era Revolusi Industri 4.0 Andy Corry Wardhani	119
4. Masalah Demokrasi Pilgub Lampung 2018 Robi Cahyadi kurniawan	124
5. Pemuda dan Kepemimpinan Pemuda Syamsul Ma'arif	129
6. Perempuan dalam Pemilu 2019 Robi Cahyadi kurniawan	134
7. Media dan Pilkada Robi Cahyadi kurniawan	140
8. Boneka Pilgub dan Cukong Bahayakan Lampung Syafarudin	145
9. Politisi Cai Bucai: KGB, MEOK dan Raja Olah Syafarudin	151
10. Reformasi Elektoral dan Evaluasi Pemilu Lampung Arizka Warganegara	154
11. Demokrasi Kita, Politik Uang dan Caden Arizka Warganegara	158
12. Mengapa KPK Hadir? Budi kurniawan	163
13. Democracy and Corruption in Indonesia Budi kurniawan	167
14. Kabinet Presidensial di Tengah Sistem Multipartai Syamsul Ma'arif	170

15. Seputar Maraknya Wabah Korupsi	
Syamsul Ma'arif	176
16. Budaya Permisif Pemilih	
Robi Cahyadi kurniawan	180
17. Menunggu Pembuktian Diri Bawaslu	
Robi Cahyadi kurniawan	185
18. Korupsi : Diberantas, Dibutuhkan dan Dipelihara?	
Syafarudin	190
Biodata Penulis	194
Biodata Editor	204

BAGIAN PERTAMA:
DINAMIKA PEMERINTAHAN

Kemiskinan Lampung dan Minimnya Inovasi Pemerintahan

BUDI KURNIAWAN/Media REPUBLIKA/2016

Muda tidak menjamin kreatifitas dan inovasi dalam pemerintahan jika dalam proses pemilihannya mengandalkan politik uang. Begitulah yang saat ini terjadi di Lampung.

Setelah satu tahun menjabat, praktis tidak ada perubahan berarti dalam pemerintahan dan pembangunan. Listrik tetap sering padam akibat kurang daya, birokrasi masih seperti yang dahulu, pembangunan infrastruktur nyaris tidak terdengar, walaupun ada hanya menumpang proyek pembangunan jalan tol pemerintah pusat. Kriminalitas masih merajalela bahkan Lampung jadi pengeksport "begal motor" ke Provinsi lain. Mengapa stagnasi pembangunan bisa terjadi di Lampung padahal Gubernurnya adalah sosok muda yang seharusnya lebih inovatif dan kreatif.

Tesis yang diangkat di tulisan ini bahwa kreatifitas pemerintahan tidak akan muncul dalam sistem pemilihan kepala daerah yang didasarkan politik uang.

Sistem politik dimana terjadi diskriminasi didasarkan kepemilikan kapital nampak nyata terjadi di Lampung. Lampung adalah contoh nyata dari extractive political institution dimana institusi politiknya didasarkan kompetisi kapital ketimbang visi dan misi.

Naiknya Ridho Ficardo tidak lepas dari sumbangsih dana kampanye besar-besaran dari Sugar Group Company.

Selama ini masyarakat Lampung tidak pernah tahu siapa dan apa kiprah Ridho Ficardo sebelum dia dicalonkan Partai Demokrat menjadi calon Gubernur Lampung. Dengan kekuatan uang dan blow up media lokal yang juga haus akan uang iklan, Ridho Ficardo menjadi sosok bubble political image yakni cepat membesar tanpa track record dan ide besar apa yang ditawarkan.

Sistem politik lokal inilah yang membuat kesempatan untuk tampil di panggung politik mengalami diskriminasi sebagaimana tesis Acemoglo dan Robinson (2012) tentang extractive political institution diatas. Sistem politik yang padat modal ini membuat

Disampaikan dalam diskusi BEM KBM 1 UNILA 16 Oktober 2015 banyak potensi politisi yang baik seperti Ridwan Kamil dan Tri Rismarini tidak pernah muncul ke panggung politik karena tidak punya modal politik utama yakni uang. Politik lokal di Lampung yang extractive dapat dilihat dari catatan penulis tentang pemilukada 2014 yang lalu. Dalam pemilukada 2014 yang lalu pertarungan Ridho Ficardo dan Herman HN selain pertempuran uang juga pertempuran antara walikota yang punya inovasi dan kreatifitas dalam pemerintahan yakni Herman HN versus yang tidak punya sama sekali track record dan murni kapital yakni Ridho Ficardo. Hasilnya track record yang baik tidak cukup untuk mengalahkan kekuatan kapital. Uniknya di pemilukada Bandar Lampung2015 ini, Herman HN diusung oleh Partai Demokrat yang ketua nya seteru lamanya Ridho Ficardo.

Ini adalah bentuk "menyerah" nya Herman HN atas kekuatan kapital Ridho Ficardo dan kekuatan modal di baliknya (Sugar Group). Jika politik adalah "tidak ada makan siang gratis" lalu apa kompensasi dari

Herman HN atas "perahu partai" dari seteru lamanya itu ? Jawaban dari wawancara baru-baru ini dengan calon kepala daerah yang didukung sugar group menarik untuk disimak. Sang calon kepala daerah berujar bahwa "Herman tidak akan mencalonkan diri di pemilihan Gubernur Lampung mendatang,

kaki sendiri tanpa koneksi dengan gedung putih atau capitol Hill. Sedangkan di Meksiko, dimana terjangkiti penyakit extractive political dan economic institution, Carlos Slim bisa kaya karena dari hasil monopoli perusahaan negara yang kemudian di privatisasi dan dibeli oleh Slim karena kedekatan dengan politikus Meksiko. Kita tentu tidak tahu apa teknologi ciptaan Carlos Slim. Hal yang sama tentu terjadi di Indonesia. Siapa yang tahu apa karya orang kaya di Indonesia kecuali inovasi rokok yang semakin memiskinkan orang miskin. Jika hari ini Lampung masih ada pemadaman Listrik dan jalan yang rusak kemudian berimbas pada masih tingginya kemiskinan maka jawabannya bukan karena Lampung tidak punya sumber daya ekonomi yang cukup untuk membangun. Tetapi hal itu lebih karena pemimpinnya yang tidak inovatif dan kreatif karena memang bagi mereka hal itu tidak penting, yang paling penting adalah uang dari pemodal untuk terpilih kembali.

Apakah ini juga terjadi di daerah yang lain ? akan menarik jika ada penelitian yang membandingkan institusi politik dan ekonomi daerah-daerah di Indonesia sehingga akan tahu substansi masalah kemiskinan daerah dan tepat sasaran arah perbaikan dan pembangunan bangsa ini. Wallahualam

Deprivasi Relatif Kepemimpinan Daerah

SIMON S. HUTAGALUNG / media.lampost.co/2014

Ketika beberapa partai politik pada beberapa daerah di Propinsi Lampung mulai mengerucutkan calon kepala daerah dan wakilnya untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah langsung maka pilkada pun memasuki tahap yang semakin menarik. Calon-calon yang dipilih tersebut akan dieksaminasi dalam rentang yang lebih luas oleh publik. Pilkada langsung dimana masyarakat lokal yang menentukan siapa yang akan terpilih menjadi kepala dan wakil kepala daerah mulai akan melakukan abstraksi terhadap pasangan calon tersebut.

Masyarakat lokal akan menjadi praktisi politik bagi dirinya sendiri. Kalkulasi-kalkulasi mereka mempunyai andil besar mengantarkan pasangan calon tersebut untuk sampai ke kursi kepala daerah. Dalam rangka mencapai hal tersebut, para calon kepala dan wakil kepala daerah dengan berbagai cara akan lebih giat berusaha memainkan bidak-bidaknya untuk menggali dukungan masyarakat.

Beraneka ragamnya karakter masyarakat yang ada di daerah akan memengaruhi pola preferensi politik masyarakat yang akan diperebutkan suaranya itu. Latar belakang seperti etnisitas, status sosial ekonomi dan agama mengkategorisasikan pola preferensi politik menjadi yang rasional dan yang emosional.

Dalam konteks demokrasi, tidak ada yang salah dengan kedua cara pandang tersebut. Setiap individu berhak memiliki perspektif masing-masing.

Hanya saja bobot dari kedua preferensi tersebut bila dibedah secara menyeluruh akan menunjukkan substansi kualitas yang berbeda juga dalam hal pandangan tentang pemimpin yang ideal bagi mereka. Wawasan politik masyarakat lokal yang variatif dalam melihat dan memilih kriteria kepala daerah akan sangat menentukan kepemimpinan daerah pada suatu kota/ kabupaten tertentu.

Ada yang akan melihat dulu *track record* sang calon, mulai dari visi dan misi kepemimpinannya, kualitas kredibilitas dan integritas moralnya. Ada juga yang hanya karena hubungan etnis, agama atau loyalitas terhadap parpol.

Para politisi daerah yang ulung tentu sadar dengan hal itu dan karenanya mereka akan berusaha mengoptimalkan kedua jalur pencitraan tersebut untuk membentuk suatu profil yang dapat diterima oleh kedua tipologi pemilih tersebut. Hal inilah yang memunculkan pertanyaan bagi rakyat, dalam kondisi tersebut bagaimana rakyat mesti melihat dan memilih pemimpin yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka?.

Kepemimpinan Daerah

Ajang Pilkada langsung nanti merupakan arena pemilihan kepala daerah yang siapapun memiliki kesempatan untuk ikut serta asalkan memenuhi syarat seperti yang telah ditentukan di dalam kebijakan tentang Pilkada. Karenanya, jabatan Kepala Daerah dan Wakilnya menjadi lahan rebutan berbagai kalangan seperti pengusaha, PNS atau mantan PNS, akademisi, mantan pejabat militer, politisi bahkan juga pejabat seperti bupati/wali kota, sekda, asisten, kepala dinas, atau kepala bagian yang masih aktif untuk ikut di dalam proses pemilihan pemimpin daerah itu.

Perbedaan latar belakang yang dimiliki oleh mereka akan memberikan pengaruh terhadap gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh individu tersebut nantinya. Gaya-gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh setiap individu yang berbeda tersebut juga akan lebih efektif bila diterapkan ke dalam lingkungan dan situasi yang berbeda-beda. Situasi daerah yang sedang membangun sebagai tantangan yang hendak dihadapi oleh seorang calon pemimpin pada sebuah daerah tentu saja berbeda dengan daerah yang lain.

Tantangan di Kota Bandar Lampung berbeda dengan tantangan di Lampung Timur, tantangan di Kota Metro juga berbeda dengan yang di Lampung Selatan. Umumnya, gaya kepemimpinan yang diperlukan pada lingkungan kota yang lebih moderat dan memiliki dinamika yang lebih kompleks akan lebih sesuai bila dipimpin oleh mereka yang juga memiliki kualifikasi tersebut.

Sementara pada daerah kabupaten yang sedang mengalami pembangunan dengan derajat tantangan yang lebih variatif juga membutuhkan pemimpin yang mampu mengelola sumber daya lokal yang ada agar potensi lokal tersebut dapat terarah tanpa harus merubah karakter lokal yang ada.

Bila kita melihat pemimpin dan kepemimpinan dalam konteks politik maka pemimpin dapat dijelaskan sebagai keluaran (*output*) dari proses memilih diantara beberapa individu yang melalui prosedur tertentu. Sementara kepemimpinan merupakan keluaran lanjutan (*outcome*) dari proses terpilihnya para pemimpin tersebut.

Jadi sebuah proses suksesi kepemimpinan tidak hanya berhenti kepada memilih siapa orang nomor satu di daerah namun akan terus berlanjut hingga kepada proses-proses integrasi si pemimpin dengan kelembagaan yang dipimpinnya. Dan dalam hal inilah daya penerimaan (*acceptability*) atau penolakan (*disacceptability*) akan menentukan bagaimana

Komunikasi Politik di Era Revolusi Industri 4.0

ANDY CORRY WARDHANI/Media.unila.ac.id

Pengantar

Saat ini dunia sudah memasuki era revolusi industri 4.0 (RI 4.0) yang ditandai dengan lompatan teknologi dalam membantu proses produksi, seperti penggunaan robot dan teknologi *artificial intelligent* (AI) yang digunakan di berbagai industri. Hal ini mengakibatkan peran manusia semakin berkurang. Dalam industri komunikasi, fenomena ini dicirikan dengan meleburnya batas antara berbagai jenis media massa konvensional seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film. Media-media tersebut, saat ini bisa hadir bersama-sama dalam satu ruangan yang difasilitasi oleh teknologi internet. Kehadiran internet telah melahirkan era komunikasi baru yang disebut sebagai era komunikasi massa individual. Kegiatan ini dikategorikan komunikasi massa karena kegiatan itu berpotensi untuk menjangkau khalayak yang luas. Pada saat yang sama, pesan yang kita sampaikan melalui internet dapat disebut sebagai komunikasi individu karena pesan itu kita buat sendiri, kita menentukan khalayak, apa yang akan dituju dan sebagai khalayak kita dapat secara selektif memilih pesan yang akan kita akses. Kelahiran era baru komunikasi massa individual telah menghadirkan tantangan baru yang harus diantisipasi.

Komunikasi politik

Komunikasi politik diibaratkan sebagai sirkulasi darah dalam tubuh. Bukan darahnya tapi apa yang terkandung dalam darah itu yang menjadikan sistem politik itu hidup (Alfian, 1993). Komunikasi politik mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) pemrosesan sistem politik dan hasil pemrosesan itu, dialirkan kembali oleh komunikasi politik.

Fagen (1966), mengartikan komunikasi politik sebagai segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Menurut Dahlan (1999) komunikasi adalah unsur yang esensial dalam demokrasi. Batasan demokrasi banyak ditentukan oleh komunikasi. komunikasi menentukan watak dan mutu demokrasi pada suatu masyarakat.

Fungsi komunikasi politik adalah:

1. Memberikan Informasi kepada masyarakat, apa yang terjadi di sekitarnya. Di sini media komunikasi memiliki fungsi pengamatan dan juga fungsi monitoring apa yang terjadi dalam masyarakat.
2. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada. Di sini para jurnalis diharapkan melihat fakta yang ada sehingga berusaha membuat liputan yang objektif yang bisa mendidik masyarakat atas realitas fakta tersebut.
3. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat. Dengan cara demikian, bisa memberi arti dan nilai pada usaha penegakan demokrasi.
4. Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Di sini media bisa berfungsi sebagai anjing penjaga (*watchdog*) sebagaimana pernah

terjadi dalam kasus mundurnya Nixon sebagai Presiden Amerika Serikat karena terlibat kasus *Watergate*.

5. Dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program lembaga politik dapat disalurkan kepada media massa. (McNair, 2003).

Berdasarkan fungsi komunikasi politik tersebut, dapat dijelaskan bahwa informasi disini memegang peran penting, begitu juga ketika komunikasi politik yang terjadi di era revolusi industri 4.0, informasi adalah kata kuncinya karena pada dasarnya pengaruh informasi yang dibawanya terhadap kitalah yang merupakan aspek terpenting.

Tantangan

Dalam komunikasi politik, keputusan yang diambil berdasarkan informasi untuk mencapai tujuan bersama yang dikehendaki. Teknologi komunikasi bisa digunakan untuk tujuan luhur atau tujuan yang jahat. Begitu juga ketika komunikasi politik memasuki revolusi industri 4.0 yang menggabungkan teknologi digital dan internet, maka teknologi tersebut bisa sebagai berkah tetapi juga bisa sebagai laknat bergantung bagaimana kita menyikapinya. Teknologi dapat memberikan berkah dalam komunikasi politik bila ia bisa mencerdaskan dan menyambungkan dengan mulus semua bagian dari sistem politik sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversi menjadi berbagai kebijaksanaan, dalam konteks ini yaitu meningkatkan keefektifan komunikasi politik. Akan tetapi bila teknologi menimbulkan komunikasi politik yang memunculkan keresahan dan perselisihan antarmanusia, maka teknologi komunikasi itu adalah laknat bagi kita. Kita dapat sebagai tuan atau korban teknologi komunikasi bergantung kepada kemampuan kita untuk menggunakannya secara bijaksana sehingga memberikan manfaat yang optimal.

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi, melibatkan banyak komunikator-komunikator politik. Mereka memerlukan kampanye untuk membentuk *personal branding* dan *organizational branding* berkaitan dengan kebijakan dan program yang ditujukan kepada khalayak sebagai target kampanyenya. Kampanye merupakan bagian penting dalam komunikasi politik menjelang pemungutan suara. Kampanye dilaksanakan melalui beragam saluran dan media komunikasi politik, ini dimaksudkan agar dapat mencapai khalayak politik secara luas dan cepat.

Berkaitan dengan tahun 2019 sebagai tahun politik, akan diulas penggunaan beragam media dalam kampanye politik maupun dalam mengekspresikan aspirasi dan kepentingan:

Pertama, di era RI 4.0, masyarakat dibanjiri oleh berbagai informasi dari beragam media, terutama media sosial. Tumpah ruahnya informasi ini menimbulkan kebingungan, manakah informasi yang benar karena tidak semua informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saat ini dunia termasuk Indonesia sedang berada dalam era pasca-kebenaran (*post-truth*). Pada era ini fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal. Masyarakat seolah didorong mengedepankan sisi emosionalnya dalam meyakini kebenaran dari suatu informasi. Akibatnya, hal yang bersifat faktual dari informasi yang diterima menjadi terpinggirkan. Kondisi seperti ini memuncak saat momen politik seperti pada kampanye pemilihan presiden. Dalam situasi tersebut, pesan-pesan *hoax* atau berita bohong menjamur dan mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan dengan fakta yang sebenarnya.

Kedua, Penggunaan teknologi komunikasi dalam RI 4.0 yang didominasi oleh penggunaan media akan membuat perasaan terasing, tidak puas, terkucil, dan tidak ada sentuhan pribadi.

Ketiga, penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligent/ AI*) dalam memproduksi berita, yang dikenal dengan

robojournalism yaitu proses produksi berita dan distribusi berita dengan menggunakan AI. Salah satu contohnya adalah proses personalisasi, dengan AI berita tidak lagi menjadi produksi massal tetapi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan pembaca. Personalisasi berita ini akan menjadi jurnalisme masa depan. (<https://tempo.co/read/1151536/mengenal-robojournalism-perpaduan-media-dengan-teknologi-ai/full&view=ok>).

Keempat, salah satu tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan pemilu adalah ketersediaan informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai kandidat pada posisi eksekutif maupun legislatif. Masyarakat ingin memilih kandidat yang berkualitas, mulai dari latar belakang, rekam jejak, pencapaian sampai ke riwayat hidup. Belum ada wadah khusus untuk mengedukasi masyarakat mengenai hal ini. Ketika nilai-nilai RI.4.0 diterapkan, maka seluruh data kandidat pemilu dapat diintegrasikan ke satu tempat resmi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat sehingga ada keterbukaan informasi. Dengan demikian diharapkan terjadi pemberdayaan dan pencerdasan pemilih.

Penutup

Dunia industri tengah memasuki era baru yang disebut Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0). Robot hadir untuk membantu proses produksi dan diprediksi menggantikan manusia. Teknologi *artificial intelligent* (AI) digunakan di berbagai industri, peran manusia semakin berkurang. Media komunikasipun tidak luput dari pengaruh RI 4.0. Penggunaan media dan informasi yang disampaikan dalam komunikasi politik telah menimbulkan keawatiran seperti menjamurnya berita *hoax*, kemudian penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligent*/ AI) dalam memproduksi berita yang dikenal dengan *robojournalism* sehingga peran jurnalisme mulai dikurangi.